

## **ANALISIS FRAMING MEDIA NASIONAL DAN LOKAL DALAM PEMBERITAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**

**Kenard Joshua Cornelius**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Negeri Surabaya  
[kenard.22150@mhs.unesa.ac.id](mailto:kenard.22150@mhs.unesa.ac.id)

**Anam Miftakhul Huda**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Negeri Surabaya  
[anamhuda@unesa.ac.id](mailto:anamhuda@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan prioritas pemerintah yang memiliki implikasi luas serta dikonstruksikan melalui pemberitaan media massa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola *framing* media nasional dan media lokal dalam memberitakan Program Makan Bergizi Gratis serta implikasinya terhadap legitimasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* Robert N. Entman yang meliputi *define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation*. Objek penelitian meliputi pemberitaan *Tempo.co* sebagai media nasional dan *Surya.co.id* sebagai media lokal. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan *framing* yang signifikan. *Tempo.co* membingkai program secara kritis dan evaluatif dengan menekankan risiko implementasi, kesiapan sistem, dan tantangan struktural, sehingga membentuk legitimasi bersyarat berbasis rasionalitas kebijakan. Sebaliknya, *Surya.co.id* menekankan aspek pengalaman lokal, respons pemerintah daerah, dan pengelolaan teknis, yang berkontribusi pada penguatan legitimasi kebijakan di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan bahwa *framing* media berperan aktif dalam membentuk legitimasi kebijakan publik secara kontekstual.

**Kata Kunci:** *Framing Media, Legitimasi Kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis, Tempo.co, Surya.co.id.*

### **Abstract**

*The Free Nutritious Meal Program is a government priority policy with broad implications and is socially constructed through mass media coverage. This study aims to analyze the framing patterns of national and local media in reporting the Free Nutritious Meal Program and to examine their implications for policy legitimacy. The study employs a qualitative approach using Robert N. Entman's framing analysis model, which includes problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. The research objects consist of news coverage from Tempo.co as a national media outlet and Surya.co.id as a local media outlet. The findings reveal significant differences in framing patterns. Tempo.co frames the program in a critical and evaluative manner by emphasizing implementation risks, systemic readiness, and structural challenges, thereby constructing conditional legitimacy based on policy rationality. In contrast, Surya.co.id highlights local experiences, regional government responses, and technical management, which contribute to strengthening policy legitimacy at the local level. These findings demonstrate that media framing plays an active role in shaping public policy legitimacy in a contextual manner.*

**Keywords:** *Media Framing, Policy Legitimacy, Free Nutritious Meal Program, Tempo.co, Surya.co.id.*

## PENDAHULUAN

Media massa merupakan aktor penting dalam sistem komunikasi modern yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial dan membentuk persepsi publik. Dalam konteks kebijakan publik, media berperan strategis dalam membingkai isu, menentukan fokus perhatian, serta membangun atau menguji legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Melalui proses *framing*, media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa sehingga memengaruhi cara publik memahami, menilai, dan merespons kebijakan pemerintah (Entman, 1993).

Perkembangan media digital memperkuat peran ini melalui intensitas pemberitaan yang tinggi dan jangkauan *audiens* yang luas. Kebijakan publik yang mendapat sorotan media secara masif berpotensi menjadi isu publik yang diperdebatkan, sekaligus diuji legitimasi sosial dan politiknya. Salah satu kebijakan yang menonjol dalam dinamika tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, menekan angka *stunting*, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Meskipun memiliki tujuan normatif yang kuat, implementasi Program Makan Bergizi Gratis memunculkan beragam respons publik dan liputan media, mulai dari dukungan hingga kritik terkait kesiapan sistem, keamanan pangan, dan pembiayaan anggaran yang besar. Pada periode September–Oktober 2025,

intensitas pemberitaan mengenai program ini meningkat signifikan, seiring munculnya berbagai peristiwa lapangan seperti kasus dugaan keracunan penerima manfaat di sejumlah daerah. Situasi ini menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai arena kontestasi wacana kebijakan di ruang publik yang dimediasi oleh media.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa legitimasi kebijakan tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dikonstruksi melalui *framing* media yang dipengaruhi oleh skala, orientasi redaksional, dan kedekatan media dengan *audiens*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pola *framing* pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis pada media nasional dan media lokal, serta mengkaji implikasinya terhadap konstruksi legitimasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman yang meliputi *define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation*.

Sebagai objek penelitian, dipilih *Tempo.co* sebagai representasi media nasional yang dikenal kritis dan analitis terhadap kebijakan publik, serta *Surya.co.id* sebagai media lokal yang memiliki kedekatan dengan isu dan masyarakat daerah, khususnya di Jawa Timur. Pemilihan kedua media ini memungkinkan analisis komparatif untuk melihat bagaimana kebijakan yang sama dibingkai secara berbeda pada level nasional dan lokal, serta bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi legitimasi kebijakan yang terbentuk.

Secara akademik, penelitian ini mengisi celah kajian *framing* media di Indonesia yang selama ini lebih banyak

berfokus pada perbandingan antar media nasional. Dengan menghadirkan media lokal sebagai objek analisis, serta mengaitkan *framing* dengan konsep legitimasi kebijakan publik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi politik dan media, khususnya dalam memahami peran media sebagai penguji sekaligus penstabil legitimasi kebijakan di ruang publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* Robert Entman. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif subjek yang diteliti, dengan menekankan pada makna, proses dan konteks. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dan deskriptif, dengan memanfaatkan konteks ilmiah yang apa adanya. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif relevan karena fokusnya adalah mengkaji bagaimana media membungkai (*framing*) sebuah program pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis dan bagaimana bingkai tersebut membentuk legitimasi di mata publik melalui bahasa, pemilihan fakta dan penonjolan isu.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti menjadi instrumen kunci yang berperan aktif dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data (Moleong, 2007). Metode ini sesuai karena analisis *framing* membutuhkan peneliti untuk memahami konteks pemberitaan,

memilih data yang relevan dan menafsirkan makna teks berita secara mendalam berdasarkan kategori model Entman.

Sedangkan menurut Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Prosesnya melibatkan pertanyaan terbuka, pengumpulan data dalam lingkungan alami, serta analisis yang membangun pola dan tema. Creswell menekankan pentingnya membangun makna dari data lapangan (Creswell, 2018). Dalam konteks penelitian framing media, ini berarti memahami alasan di balik pemilihan kata, sudut pandang dan narasi yang digunakan media.

## HASIL

### A. Perbandingan Pola Framing Media (Nasional vs Lokal)

Setelah dianalisis secara terpisah, pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis di media nasional *Tempo.co* dan media lokal *Surya.co.id* menunjukkan perbedaan pola *framing* yang cukup signifikan. Penelitian ini melakukan perbandingan pola *framing* Program Makan Bergizi Gratis dalam pemberitaan media nasional *Tempo.co* dan media lokal *Surya.co.id*. Perbandingan dilakukan untuk melihat perbedaan cara kedua media tersebut dalam menonjolkan aspek tertentu (*salience*), mendefinisikan masalah, menetapkan penyebab, memberikan penilaian moral, serta merekomendasikan solusi atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Secara umum, *Tempo.co* dan *Surya.co.id* sama-sama menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai isu kebijakan publik yang penting. Namun, keduanya menunjukkan perbedaan yang

cukup signifikan dalam cara membingkai masalah, menentukan aktor utama, serta menafsirkan risiko dan implikasi program tersebut. Perbedaan pola *framing* pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis antara media nasional dan media lokal dapat dipahami melalui perspektif teori *framing* media, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Robert N. Entman. Entman menyatakan bahwa *framing* merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk definisi masalah, penafsiran sebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Dengan demikian, *framing* tidak hanya menentukan apa yang diberitakan media, tetapi juga bagaimana suatu isu dipahami oleh publik. Selain itu ini tidak hanya berkaitan dengan skala media (nasional dan lokal), tetapi juga dengan orientasi jurnalistik dan kedekatan media terhadap konteks sosial yang diberitakan.

Dalam pemberitaan *Tempo.co*, Program Makan Bergizi Gratis lebih sering dibingkai sebagai kebijakan negara yang perlu diuji secara rasional, berorientasi pada aspek teknis, dan struktural. Media ini cenderung menonjolkan aspek perencanaan kebijakan, kesiapan anggaran, efektivitas implementasi, serta potensi risiko sistemik yang menyertai pelaksanaan program, seperti masalah tata kelola, pengawasan, dan keselamatan penerima manfaat. *Framing* *Tempo.co* memperlihatkan kecenderungan untuk memosisikan negara dan pemerintah pusat sebagai aktor utama yang harus dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, legitimasi kebijakan dalam pemberitaan *Tempo.co* dibangun melalui pertimbangan rasional dan empiris, bukan semata-mata melalui narasi yang

menekankan nilai dan tujuan mulia program.

Sebaliknya, pemberitaan *Surya.co.id* lebih menekankan dimensi lokal dan pengalaman empiris di lapangan. Program Makan Bergizi Gratis digambarkan melalui peristiwa konkret yang terjadi di sekolah-sekolah, respons orang tua dan siswa, serta peran pemerintah daerah dan aktor lokal dalam pelaksanaan program. *Framing* yang dibangun cenderung memfokuskan perhatian pada bagaimana program dijalankan, dirasakan, dan direspon oleh masyarakat di tingkat daerah. Masalah atau kendala pelaksanaan, seperti temuan makanan bermasalah atau keterlambatan distribusi, lebih sering diposisikan sebagai kejadian yang terjadi dalam konteks tertentu yang membutuhkan evaluasi teknis, bukan sebagai indikasi kegagalan sistem kebijakan secara menyeluruh.

Perbedaan pola framing ini juga berdampak pada konstruksi makna dan risiko yang dimunculkan. *Tempo.co* cenderung mengonstruksikan risiko Program Makan Bergizi Gratis sebagai risiko sistemik, yang berkaitan dengan desain kebijakan, tata kelola nasional, dan kapasitas negara dalam mengelola program berskala besar. Sementara itu, *Surya.co.id* lebih banyak menampilkan risiko sebagai risiko operasional dan lokal, yang muncul dari praktik di lapangan dan dapat diperbaiki melalui pengawasan serta evaluasi di tingkat daerah.

Dari sisi fungsi media, *Tempo.co* secara konsisten menjalankan fungsi *watchdog* dengan menempatkan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam kerangka kritik dan pengawasan terhadap negara. Media ini berperan mendorong

pembahasan publik yang kritis serta menuntut akuntabilitas pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, *Surya.co.id* lebih menonjolkan fungsi media sebagai mediator dan stabilisator sosial, dengan menyajikan informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat serta menekankan upaya penyelesaian masalah di tingkat lokal tanpa memperluasnya menjadi kritik struktural terhadap kebijakan nasional. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan *framing* antara media nasional dan media lokal bukan semata-mata persoalan sikap mendukung atau menolak kebijakan, melainkan mencerminkan perbedaan peran dan posisi media dalam ekosistem komunikasi kebijakan publik. Media nasional berfungsi sebagai pengawas kebijakan pada level makro, sementara media lokal berperan menjembatani kebijakan dengan realitas sosial masyarakat di tingkat daerah.

### B. Konstruksi Makna Legitimasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Framing Media

Setelah membandingkan pola *framing* media nasional dan media lokal dalam pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis, subbab ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media mengonstruksikan makna legitimasi atas program tersebut. Legitimasi dalam konteks ini dipahami bukan sebagai penerimaan yang bersifat normatif semata, melainkan sebagai hasil dari proses pembingkaian media terhadap tujuan, pelaksanaan, risiko, dan dampak Program Makan Bergizi Gratis di ruang publik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa legitimasi Program Makan Bergizi Gratis

dikonstruksikan secara berbeda oleh media nasional dan media lokal. *Tempo.co* cenderung membangun legitimasi kebijakan secara bersyarat (*conditional legitimacy*), yakni dengan menempatkan program sebagai kebijakan negara yang harus diuji melalui kesiapan anggaran, efektivitas implementasi, serta kapasitas tata kelola dan pengawasan. Sementara itu, *Surya.co.id* lebih banyak membangun legitimasi berbasis pengalaman lokal (*experiential legitimacy*), dengan menekankan keberadaan program dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta respons pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan teknis di lapangan.

Dalam pemberitaan *Tempo.co*, legitimasi Program Makan Bergizi Gratis tidak dibangun melalui narasi keberhasilan simbolik, melainkan melalui rasionalitas kebijakan. Media ini secara konsisten menonjolkan aspek anggaran per porsi, risiko sistemik, kesiapan infrastruktur, serta temuan lembaga pemantau dan kritik para ahli. Dengan demikian, legitimasi program dikonstruksikan sebagai sesuatu yang harus diperoleh melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan, bukan sekadar melalui tujuan normatif untuk meningkatkan gizi anak.

Sebaliknya, *Surya.co.id* mengonstruksikan legitimasi Program Makan Bergizi Gratis melalui kedekatan geografis dan sosial dengan pembaca. Pemberitaan lebih banyak menampilkan respons cepat aktor lokal, langkah korektif pemerintah daerah, serta upaya menjaga stabilitas pelaksanaan program di tengah berbagai kendala. Dalam konteks ini, masalah yang muncul seperti keterlambatan distribusi atau temuan kualitas makanan lebih sering diposisikan sebagai persoalan

teknis yang dapat diperbaiki, bukan sebagai indikasi kegagalan kebijakan secara struktural.

Temuan ini sejalan dengan konsep *framing* yang dikemukakan oleh Entman (1993), yang menyatakan bahwa *framing* bekerja dengan menyeleksi aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya untuk membentuk definisi masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Melalui proses tersebut, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara publik memahami dan menilai legitimasi suatu kebijakan (Entman, 1993).

Dalam perspektif teori legitimasi, Suchman (1995) memandang legitimasi sebagai persepsi atau asumsi bahwa tindakan suatu entitas dianggap diinginkan, pantas, atau sesuai dengan sistem nilai dan norma sosial yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian ini, legitimasi Program Makan Bergizi Gratis dikonstruksikan media melalui dua jalur utama, yakni legitimasi yang dibangun melalui pertimbangan rasional dan teknis kebijakan (*Tempo.co*) dan legitimasi yang dibangun dari pengalaman langsung masyarakat (*Surya.co.id*).

Dengan demikian, legitimasi Program Makan Bergizi Gratis dalam *framing* media tidak bersifat tunggal dan homogen, melainkan dibentuk melalui logika jurnalistik dan posisi media masing-masing. Media nasional cenderung menjalankan fungsi kontrol dan pengujian kebijakan, sementara media lokal lebih berperan sebagai penstabil sosial yang menjembatani kebijakan nasional dengan realitas lokal. Perbedaan konstruksi legitimasi ini menunjukkan bahwa media

memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman publik terhadap kebijakan publik, baik sebagai arena kritik maupun sebagai ruang normalisasi kebijakan di tingkat masyarakat.

## PEMBAHASAN

Pembahasan difokuskan pada temuan penelitian mengenai *framing* Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif teori komunikasi, khususnya teori *framing*, konstruksi legitimasi kebijakan, dan fungsi media massa. Diskusi ini bertujuan untuk menempatkan temuan empiris dalam kerangka konseptual yang lebih luas guna memahami relevansi bagi kajian teoretis dari perbedaan *framing* media nasional dan media lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *framing* *Tempo.co* dan *Surya.co.id* selaras dengan konsep *framing* yang dikemukakan Entman (1993), di mana media tidak hanya memilih isu tertentu, tetapi juga menonjolkan aspek tertentu dari realitas sosial untuk membentuk pemaknaan audiens. *Tempo.co* secara konsisten mendefinisikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik yang memiliki risiko struktural dan membutuhkan pengawasan, sementara *Surya.co.id* lebih menempatkannya sebagai program sosial yang hadir dalam keseharian masyarakat lokal (Entman, 1993).

Dalam perspektif teori legitimasi, temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak dibangun secara tunggal. Mengacu pada Suchman (1995), legitimasi dapat bersifat pragmatis, moral, maupun kognitif. *Tempo.co* cenderung membangun legitimasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis melalui legitimasi rasional dan prosedural, dengan menekankan aspek anggaran, efektivitas, dan tata kelola. Sebaliknya, *Surya.co.id* lebih menekankan

legitimasi pragmatis dan kultural melalui narasi pengalaman lokal, kedekatan emosional, serta keterlibatan aktor daerah (Suchman, 1995).

Perbedaan *framing* juga mencerminkan perbedaan fungsi media. *Tempo.co* menjalankan fungsi media sebagai *watchdog* dengan menyoroti risiko kebijakan, potensi kegagalan, dan tuntutan akuntabilitas negara. Sementara itu, *Surya.co.id* lebih menonjolkan fungsi stabilisasi sosial, yakni menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan nasional melalui pemberitaan yang menekankan respons pemerintah daerah, upaya perbaikan, dan kelangsungan program (McQuail, 2010). Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *framing* media tidak hanya membentuk cara publik memahami kebijakan, tetapi juga berperan dalam membangun legitimasi kebijakan melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan posisi dan fungsi media. Temuan ini menegaskan pentingnya melihat perbedaan konteks media nasional dan lokal dalam kajian komunikasi kebijakan publik.

## PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Program Makan Bergizi Gratis dikonstruksikan melalui *framing* media nasional dan media lokal, serta bagaimana perbedaan pola *framing* tersebut membentuk makna legitimasi kebijakan di ruang publik. Berdasarkan analisis *framing* model Entman terhadap pemberitaan *Tempo.co* sebagai representasi media nasional dan *Surya.co.id* sebagai representasi media lokal, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan utama.

Pertama, media nasional dan media lokal menunjukkan perbedaan mendasar

dalam mendefinisikan masalah (*define problems*) Program Makan Bergizi Gratis. *Tempo.co* cenderung membingkai Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik berskala nasional yang memiliki implikasi struktural, fiskal, dan tata kelola jangka panjang. Masalah Program Makan Bergizi Gratis dalam *framing* media nasional tidak berhenti pada insiden teknis di lapangan, melainkan dikaitkan dengan kesiapan anggaran, rasionalitas desain kebijakan, efektivitas implementasi, serta kapasitas pengawasan negara. Sebaliknya, *Surya.co.id* lebih sering mendefinisikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program sosial yang hadir dalam konteks keseharian masyarakat lokal, dengan fokus pada peristiwa konkret di sekolah, dapur SPPG, serta respons aktor-aktor daerah. Masalah yang muncul lebih diposisikan sebagai kendala teknis atau insidental dalam pelaksanaan, bukan sebagai persoalan desain kebijakan secara menyeluruh.

Kedua, perbedaan *framing* semakin terlihat pada aspek *diagnose causes*. *Tempo.co* secara konsisten mengarahkan penyebab persoalan Program Makan Bergizi Gratis pada faktor sistemik, seperti keterbatasan anggaran per porsi, kompleksitas rantai distribusi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta ketimpangan kapasitas pemerintah daerah. Dengan demikian, persoalan Program Makan Bergizi Gratis dipahami sebagai risiko kebijakan yang melekat pada skala nasional program tersebut. Sebaliknya, *Surya.co.id* lebih sering mengaitkan penyebab masalah pada kelalaian aktor pelaksana di tingkat lokal, seperti keterlambatan distribusi, kurangnya ketelitian penyedia makanan, atau kendala administratif daerah. Pola ini membuat problem Program Makan Bergizi

Gratis tampil sebagai 89 kesalahan teknis yang tidak menyeluruh dan dapat diperbaiki tanpa menggugat kebijakan secara keseluruhan.

Ketiga, dalam *make moral judgement*, *Tempo.co* membangun penilaian normatif berbasis rasionalitas kebijakan dan akuntabilitas publik. Legitimasi Program Makan Bergizi Gratis dalam pemberitaan media nasional tidak diberikan secara otomatis, melainkan bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara transparan, efektif, dan berkelanjutan. Kritik dari pakar, lembaga pengawas, dan temuan investigatif menjadi instrumen penting dalam membentuk penilaian moral tersebut. Sebaliknya, *Surya.co.id* cenderung menghadirkan penilaian moral yang lebih menerima terhadap kebijakan, dengan menonjolkan niat baik pemerintah, manfaat langsung bagi siswa, serta komitmen aktor lokal dalam memperbaiki kekurangan. Kritik tetap hadir, namun tidak diarahkan pada legitimasi kebijakan nasional, melainkan pada aspek pelaksanaan di lapangan.

Keempat, pola *treatment recommendation* yang ditawarkan kedua media juga berbeda secara signifikan. *Tempo.co* lebih sering mendorong evaluasi kebijakan secara menyeluruh, perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengawasan, serta peninjauan ulang desain anggaran dan implementasi. Rekomendasi ini menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan yang harus terus diuji secara kritis. Sebaliknya, *Surya.co.id* lebih menekankan solusi praktis dan administratif, seperti evaluasi dapur SPPG, peningkatan koordinasi daerah, dan perbaikan teknis distribusi, tanpa

mempertanyakan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional.

Berdasarkan keempat elemen *framing* tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa media nasional dan media lokal mengonstruksi makna legitimasi Program Makan Bergizi Gratis secara berbeda. *Tempo.co* membangun legitimasi kebijakan melalui logika berbasis pertimbangan rasional dan teknis, di mana kebijakan dinilai sah sejauh memenuhi prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Sementara itu, *Surya.co.id* membangun legitimasi melalui logika pengalaman langsung dan kedekatan sosial, di mana kebijakan dianggap sah karena dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal dan tetap dapat diperbaiki meskipun menghadapi kendala.

Temuan utama (*novelty*) dari penelitian ini adalah identifikasi pola yang memperlihatkan dua sudut pandang legitimasi kebijakan dalam pemberitaan media, yakni legitimasi yang dibangun melalui mekanisme sistem di media nasional dan legitimasi berbasis pengalaman lokal di media daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa *framing* media lokal tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai informasi kebijakan, tetapi juga sebagai stabilisator sosial yang meredam potensi delegitimasi kebijakan nasional dengan membingkai masalah sebagai insiden teknis, bukan kegagalan sistem. Temuan ini memperkaya kajian *framing* dengan menambahkan dimensi fungsi media lokal dalam menjaga stabilitas penerimaan kebijakan publik di tingkat masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis: An

- Expanded Sourcebook. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/J.1460-2466.1993.TB01304.X>
- Goffman, E. (1986). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. In Food Policy (Issue 97). Northeastern University Press.
- Gusti, I., & Putra, N. (2006). Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 3(2). <https://doi.org/10.24002/JIK.V3I2.235>
- Hanifa, F., Tarigan, M. B., Lestari, P., Syamsinar, T., & Hasibuan, H. A. (2024). PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMPERKUAT ATAU MELEMAHKAN DEMOKRASI PANCASILA. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 2(6), 232–242. <https://doi.org/10.61722/JIPM.V2I6.540>
- Hutagalung, M. (2024). Framing Public Perception: A Narrative Review of Media's Influence in the Digital Era. *Communica: Journal of Communication*, 2(1), 44–57. <https://doi.org/10.61978/COMMUNICA.V2I1.653>
- K. Denzin, N., & S. Lincoln, Y. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In International Journal of Social Research Methodology (4th ed., Issue 2). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1080/13645570902966056>
- Kalogeropoulos, A., Toff, B., & Fletcher, R. (2024). The Watchdog Press in the Doghouse: A Comparative Study of Attitudes about Accountability Journalism, Trust in News, and News Avoidance. *International Journal of Press/Politics*, 29(2), 485–506. [https://doi.org/10.1177/19401612221112572/SUPPL\\_FILE/SJ-DOCX-1-HIJ-10.1177\\_19401612221112572.DOCX](https://doi.org/10.1177/19401612221112572/SUPPL_FILE/SJ-DOCX-1-HIJ-10.1177_19401612221112572.DOCX)
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024, December 16). Gizi Seimbang untuk Masa Depan: Program Stunting Prabowo Mendukung SDGs | Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024, December 18). Makan Bergizi Gratis dan SDM Unggul. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, January 17). Presiden Prabowo Dorong Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia | Sekretariat Negara.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, February 19). Mendukung Terselenggaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua | Sekretariat Negara.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, August 15). Program Makan Bergizi Gratis Sentuh 20 Juta Penerima, Ciptakan 290 Ribu Lapangan Kerja | Sekretariat Negara.
- Krippendorff, K. (2013). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In CSAE Working Paper (3th ed.). SAGE Publications.
- Lofland, J., & Lofland, L. H. (1995). Third Edition Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (3th ed.). Wadsworth Publishing Company.

McQuail, D. (2010). McQuail's Media and Mass Communication. SAGE Publications, April.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Quinn Patton, M. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). SAGE Publications.

Safitri, P. N. (2019). Dinamika Media Komunikasi Sebagai Interaksi Politik: Vol. XI (Issue 2). <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/POLITIK>

Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571. <https://doi.org/10.2307/258788>